

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI TUNA WISMA DI KOTA MEDAN

¹Putri Yanti Hasibuan, ²Samsul Bahri Pane

¹Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara

²Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: mardian948@gmail.com

ABSTRACT

The high number of homeless people in Medan is caused by economic and cultural factors of the community. The most important thing that the social service must pay attention to is the guidance for the homeless. Because at certain times the homeless population increases, such as on holidays, religious holidays, and in recreation centers. So this study aims to determine the role of social services in tackling homelessness, preventive development of social services, and repressive guidance of social services against homeless people in Medan city. By using descriptive methods with qualitative data analysis techniques where data were obtained through interviews and observations. The results showed that the role of the Medan City Social Service in tackling the homeless in the city of Medan was in accordance with Government Regulation No. 31 of 1980 in a preventive and repressive way, namely by conducting data collection raids and empowerment but not yet optimal. The obstacles in tackling the homeless are the absence of a special container or shelter in the city of Medan to accommodate the homeless who are specifically for Medan residents.

Keywords : homeless

PENDAHULUAN

Pemerintahan kota medan membuat kebijakan penanganan tuna wisma, namun ternyata masih belum bisa menjangkau tuna wisma secara keseluruhan. Bahkan masih banyak tuna wisma yang sudah dilakukan pembinaan, namun masih kembali ke jalanan lagi. Terlepas dari pembinaan yang diberikan kepada tuna wisma agar mereka terampil dan mandiri dalam menuju kedewasaan

nantinya, untuk itu pemerintahan dan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menanggulangi permasalahan tersebut, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial.

Tingginya angka tuna wisma di kota medan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan budaya masyarakat. Hal terpenting ini juga harus diperhatikan oleh dinas sosial adalah pembinaan terhadap tuna wisma tersebut. Karena diwaktu tertentu populasi tuna wisma meningkat, seperti dihari libur, hari raya keagamaan, maupun di pusat-pusat rekreasi. Namun jika karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung menjadi faktor anak turun ke jalanan untuk bekerja membantu orang tuanya.

Maka pembinaan terhadap keluarga yang harus dilakukan oleh dinas sosial adalah dengan pemberdayaan ekonomi keluarga yang menciptakan kemandirian, sehingga akhirnya dengan berbagai program pembinaan yang diberikan, baik kepada si anak maupun kepada keluarganya diharapkan mereka tidak kembali lagi ke jalanan. Karena diwaktu tertentu populasi tuna wisma meningkat, seperti dihari libur, hari raya keagamaan, maupun di pusat-pusat rekreasi. Dari uraian tersebut tergambar bahwa penulis menganalisis peran dinas sosial dalam menanggulangi tuna wisma di kota medan.

A. TUNA WISMA

Menurut Markum (dalam Fu'adah, dkk, 2017:45), Tunawisma merupakan orang miskin yang tidak memiliki rumah dan biasanya tinggal di taman kota, pinggir jalan, tenda atau tempat-tempat yang disediakan oleh lembaga sosial. Tuna wisma merupakan individu atau kelompok orang yang bertahan hidup akibat tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap, sehingga hidupnya dalam keadaan tidak sesuai dengan

norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat.

B. TEORI KEMISKINAN

Mengenai arti dari kemiskinan sangatlah beragam, keberagaman dalam definisi kemiskinan dikarenakan masalah tersebut telah merambat pada level multidimensional, artinya kemiskinan berkaitan satu sama lain dengan berbagai macam dimensi kebutuhan manusia. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup dapat dikatakan sebagai kemiskinan. (Todaro, dalam Wahyudi & Rejekiingsih, 2013:1).

Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*proverty line*). Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang tidak terkecuali Indonesia.

seseorang atau keluarga dapat dikatakan miskin atau hidup dalam Kemiskinan jika pendapatan mereka atau akses mereka terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan Kebanyakan orang dalam perekonomian. Namun adanya kebijakan yang menurut Afifah dan Yuningsih (2016:330) kebijakan yang merupakan sebuah keputusan politis yang diambil oleh pemerintahan sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan publik.

C. PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL

Tujuan utama dilakukannya pembangunan di bidang sosial (*sosial development*) adalah mengurangi penderitaan manusia, baik yang disebabkan oleh bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. melalui program yang dapat memberikan manfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan-pembangunan sosial.

Beberapa program pemerintah yang menjadi pusat perhatian dalam kaitannya dengan program pembangunan sosial

mencakup pendidikan kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan, dan pengentasan kemiskinan. dengan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia misalnya kebutuhan pangan sandang, Perumahan pendidikan dan kesehatan.

Program pembangunan nasional harus dilakukan secara sistematis rasional efektif dan efisien yang sasaran utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat atau manusia Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bagi negara Republik Indonesia yang mengisyaratkan bahwa untuk terwujudnya kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah melalui usaha pembangunan sosial.

pembangunan sosial dapat dilakukan secara individual atau perseorangan ataupun secara kolektif, atau kelompok pembangunan sosial juga merupakan suatu proses yang mengangkat hubungan kekuasaan-kekuasaan yang berubah menjadi hubungan pemberdayaan antara individu kelompok, dan lembaga-lembaga sosialnya, usaha pelaksanaan pembangunan dalam rangka memenuhi taraf Kesejahteraan Sosial perlu terus dikembangkan karena sebagian besar rakyat Indonesia belum mencapai taraf kesejahteraan sosial. yang diharapkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh elemen bangsa untuk pemenuhan Kesejahteraan Sosial menjadi isu secara nasional.

Asumsinya bahwa kemajuan bangsa ataupun keberhasilan suatu rezim pemerintahan tidak lagi dilihat hanya meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi, karena kemampuan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial pun menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan seperti penanganan masalah Kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, ataupun korban bencana alam dan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif (deskriptif kualitatif), data yakni menggambarkan peran aparatur dinas

sosial dan tenaga kerja dalam menanggulangi tuna wisma di Kota Medan, lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor dinas sosial dan tenaga kerja yang beralamat di JL. Pinang Baris No.114 Medan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan langsung ke lokasi penelitian, untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, dilakukannya dengan cara observasi, dan wawancara.

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisa data kualitatif, yaitu dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul. Selain itu data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, artinya untuk

analisis data tidak diperlukan model uji statistik dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Melaikan lebih ditujukan sebagai tipe penelitian deskriptif.

Dan kutipan hasil wawancara dan observasi sejauh mungkin akan ditampilkan untuk mendukung analisis yang disampaikan, sehingga pada akhirnya diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber daya manusia di dinas sosial kota medan berjumlah 55 orang yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) Sebanyak 37 orang dan pegawai tidak tetap/tenaga kontrak 18 orang. Komposisi aparatur sipil negara berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat di Tabel 1.1

Tabel 1.1. komposisi aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Sosial Kota Medan

NO	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total
		Pria	Wanita	
1	IV-B/Pembina Tk.I	2	1	3
2	IV-A/Pembina	3	-	3
3	III-D/Penata Tk.I	2	5	7
4	III-C/Penata	6	2	8
5	III-B/Penata Muda Tk.I	5	3	8
6	III-A/Penata Muda	2	-	2
7	II-D/Pengatur Tk.I	2	-	2
8	II-C/Pengatur	2	-	2
9	II-B/Pengatur Muda Tk.I	-	2	2
JUMLAH		24	13	27

Sumber : Dinas Sosial Kota Medan

Beberapa pencapaian yang telah diperoleh Dinas Sosial Kota Medan antara lain:

1. Terdapatnya struktur organisasi tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam penanggulangan tunawisma, gepeng dan wanita tuna susila PMKS sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Sosial nomor 08 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial sehingga setiap tim yang terlibat dalam

razia pmks dapat bertanggung jawab kepada pimpinannya Dan dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan.

2. Terciptanya koordinasi kelembagaan yang baik diantara unit dalam organisasi unit reaksi cepat (URC) Dinas Sosial Kota Medan sehingga bisa saling responsif-antisipatif antar instansi terkait yang terlibat dalam tim razia bersama tim URC Dinas Sosial Kota Medan.
3. Adanya dukungan dana dari pusat dan APBD Kota Medan

untuk pengembangan potensi PSKS untuk mendorong agenda memprioritaskan pengentasan kemiskinan sebagai skala prioritas yang utama.

4. Komitmen serta dukungan dari Dinas Sosial Kota Medan berupa sharing anggaran, untuk pembinaan kesejahteraan veteran agar dapat mendukung aktivitas sekaligus penghargaan kepada veteran terhadap masa tua bagi para Veteran pejuang kemerdekaan RI sehingga dapat sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 67 tahun 2014 tentang tunjangan veteran, tanda kehormatan, dana kehormatan, tunjangan veteran dan tunjangan bagi janda, duda, serta yatim piatu Veteran.
5. Komitmen serta dukungan dari Dinas Sosial Kota Medan berupa sharing anggaran untuk pembinaan potensi KUBE dan TKSK agar dapat memfasilitasi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dalam memberikan modal usaha yang diberikan oleh dinas sosial
6. Adanya struktur organisasi tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam penanggulangan bencana melalui TAGANA Dinas Sosial Kota Medan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.

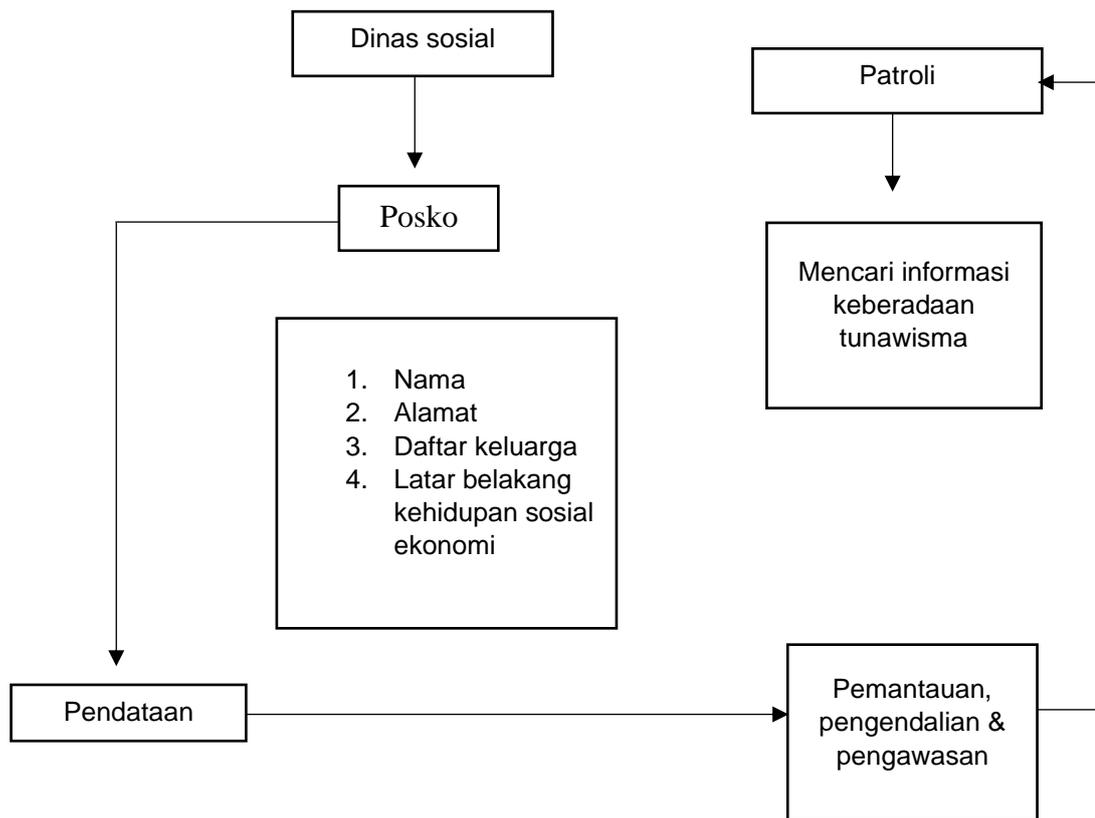
1. Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Tuna Wisma di Kota Medan

Pemerintah kota Medan untuk mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun

2003 tentang larangan Gelandangan dan pengemis serta praktek Susila di Kota Medan yang merupakan kebijakan publik tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah kota Medan. Tentunya mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran Dinas Sosial dalam menangani pengemis.

Dinas Sosial dalam melaksanakan peranannya mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang larangan Gelandangan dan pengemis serta praktek Susila di kota Medan dimana diamanahkan untuk dibentuk tim patroli yang terdiri dari 3 unsur yaitu Dinas Sosial Kota Medan Satpol PP kota Medan, dan Polrestabes kota Medan. Tim melakukan patroli di titik lampu merah yang ada di kota Medan namun di sela-sela waktu tertentu, biasa mendapatkan Laporan masyarakat melalui call center, media sosial seperti Facebook, atau di aplikasi Medan rumah kita. kemudian adanya grup WA untuk memudahkan koordinasi baik secara internal maupun secara eksternal, karena didalamnya ada pihak-pihak lain diantaranya semuanya Kecamatan masuk ke dalam grup.

Jadi ditinjau dari peran dalam penanganan khususnya masalah tunawisma lebih memudahkan tim dalam bekerja karena sudah dilengkapi patroli. jadi peran dalam penanganan khususnya masalah tunawisma lebih memudahkan tim dalam bekerja. dimana langkah atau bentuk pembinaan yang langsung dilakukan itu ada tiga, yaitu pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial, namun masalah tunawisma hanya melakukan pembinaan saja.



Gambar 1. Skema Penanganan Tuna Wisma

Pada gambar 4 titik 6 terlihat bawah tahap awal yang dilakukan oleh dinas sosial adalah melakukan pendataan, dimana pada kegiatan pendataan tersebut dinas sosial dapat mengetahui identitas pengemis tersebut dengan cara menanyakan nama alamat, daftar keluarga, latar belakang kehidupan sosial, ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status, keluarga, dan permasalahan pokok yang dihadapi.

setelah didata lalu dipulangkan, pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengamati perkembangan, dan mengidentifikasi masalah-masalah tunawisma, dengan cara melakukan patroli maka tim melakukan pengawasan yang nantinya, sebagai informasi betul atau tidaknya tunawisma tersebut masih melakukan aktivitasnya dan jika masih maka akan di jaring atau ditangkap untuk selanjutnya ditindak lanjuti.

2. Hasil Penanggulangan Tunawisma Oleh Dinas Sosial Kota Medan

Hasil akhir dari program pemberdayaan tersebut memberikan 2 pilihan, yaitu tunawisma bersatu kembali dengan keluarga, dan komunitasnya supaya hak-hak dasar, dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kasih sayang, dan tanggung jawab, serta menjalani hidup berdasarkan pemberdayaan yang telah dilakukan saat berada di rumah singgah, atau tetap diasuh dan ditanggung pemerintah.

Untuk pilihan pertama yakni tunawisma bersatu kembali dengan keluarga, dan komunitasnya dapat dilakukan jika tunawisma tersebut memiliki keluarga yang memang memperdulikannya. Namun untuk tunawisma yang tidak memiliki keluarga, di lepas kembali oleh dinas sosial setelah dilakukan pemberdayaan di rumah singgah, tapi karena usia yang sudah tua dan jenjang pendidikan yang Rendah membuat tunawisma kesulitan untuk memperoleh lapangan pekerjaan sehingga tidak bisa mengaplikasikan hasil

pemberdayaan yang telah diperolehnya. Hal ini tentu saja menjadikan tunawisma tersebut kembali melakukan aktivitasnya meminta-minta di jalanan tentu saja hasil ini menjadikan penanggulangan tunawisma di kota Medan menjadi tidak efektif dan sia-sia.

3. Pelayanan Dinas Sosial Menanggulangi Tuna Wisma di Kota Medan

pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan merupakan pembinaan yang fokus pada pengurangan jumlah tunawisma yang melakukan aktivitas di jalanan, mereka akan diberikan pemberdayaan berupa pelatihan keterampilan kerja oleh tiap-tiap individu untuk diberikan stimulan dalam bentuk pemberian peralatan kerja untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki.

Ketika dianggap sudah mampu menghasilkan uang dan hasil keterampilan yang dimilikinya, barulah dilakukan pelepasan. Namun pelepasan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan tidak dibarengi dengan fasilitasi ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja mereka atau kembali ke keluarganya, atau lingkungannya untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya dalam bentuk usaha.

Harusnya Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh dinas sosial saja akan tetapi adanya kerjasama yang dilakukan bersama Satpol PP dan kepolisian, juga masyarakat yang ikut andil terhadap pelayanan tunawisma ini. meskipun tidak jarang pula ada mahasiswa yang ikut sebagai bentuk bakti sosial terhadap tunawisma. begitu juga patroli keliling yang dilakukan oleh dinas sosial dan instansi terkait tidak hanya sekedar patroli saja namun Mun juga dilakukan sosialisasi kepada mereka yang hidup di jalan.

4. Hambatan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Tuna Wisma di Kota Medan

Upaya Dinas Sosial dalam penanganan tunawisma di kota Medan Belum dapat dikatakan berhasil, dalam menanggulangi tunawisma di kota Medan. Dinas Sosial mengalami hambatan hambatan berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa

hambatan yang diperoleh Dinas Sosial Kota Medan, dalam penanggulangan tunawisma yaitu belum Tersedianya tempat penampungan yang khusus dimiliki kota Medan. Sehingga penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan Belum efektif. Selain itu keterbatasan anggaran dana juga menjadi hambatan bagi Dinas Sosial dalam menerapkan program-program dalam menanggulangi tunawisma di kota Medan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pengamatan dari peneliti, maka dapat disimpulkan peran Dinas Sosial dalam menanggulangi tunawisma berupa usaha preventif dan usaha Represif yang diuraikan sebagai berikut:

1. Usaha preventif yang dilakukan adalah dengan memberikan pemberdayaan berupa pelatihan keterampilan kerja oleh tiap-tiap individu untuk diberikan stimulan dalam bentuk pemberian peralatan kerja untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Namun usaha ini tidak berjalan dengan efektif karena tidak dibarengi dengan difasilitasi ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga tunawisma yang sudah diberdayakan untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya dalam bentuk usaha.
2. Usaha Represif yang dilakukan oleh dinas sosial saat ini adalah melakukan razia dan selanjutnya dilakukan pendataan untuk tahap awalnya, lalu dilepas kembali berbeda dengan dulu yaitu setelah dilakukan razia maka dibawa ke penampungan berupa rumah singgah untuk melakukan usaha preventif. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran biaya dalam menanggulangi hidup tunawisma tersebut.
3. Dalam menjalankan programnya Dinas Sosial Kota Medan masih memiliki banyak hambatan atau kendala yaitu belum memiliki penampungan khusus milik pemerintah kota Medan untuk tunawisma yang tertangkap. Sehingga saat ini usaha preventif

tidak dilakukan lagi tidak Efektif jika tunawisma yang ditangkap lalu dilakukan pemberdayaan namun dibebaskan dan kemudian mereka mengulangi perbuatannya karena terdesak oleh kebutuhan sehari-hari.

4. Melihat permasalahan yang telah ditangani oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam pemberdayaan tunawisma dulu sudah dilakukan upaya-upaya namun belum mencapai hasil yang baik dan efektif dan kini justru pemberdayaan yang harusnya dilakukan justru terhenti.

REFERENSI

- Aditya A'an & Liana Cory. 2017. Penganganan Pemerintahan Kota Surabaya Terhadap Keberadaan Tuna Wisma Di Surabaya Masa Walikota Moehadji Widjaja (1980-1984). AVATARA e-Journal pendidikan sejarah. 5(1) : 151-164.
- Afifah D.F & Yuningsih N.Y. 2016 Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2(2) : 330-360
- Jamaludin A.N. 2016. Sosiologi Pembangunan. CV Pustaka Setia : Bandung
- Klinik Hukum. 2012. Sanksi Hukum Bagi Pengemis Dan Pemberi Uang Pada Pengemis
- Tahir Arifin. 2011. Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pustaka Indonesia Press
- Walikota Medan. 2017. Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan